



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 73 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 99
TAHUN 2017 TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA
PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LITBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 99 Tahun 2017 telah diatur mengenai analisis jabatan dan analisis beban kerja pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan tertib administrasi dan kepastian penataan pegawai pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara, maka Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disempurnakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 99 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
13. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan;

14. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kamus Jabatan Fungsional Umum Pegawai Negeri Sipil;
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 Nomor 16).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 99 TAHUN 2017 TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LITBANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 99 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Nomor 99), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Lampiran diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
2. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 5A, yang selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

- (1) Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagai prasyarat untuk menyusun peta jabatan, uraian jabatan, serta jumlah kebutuhan PNS.
- (2) Peta jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13 Desember 2019

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,



IRIANTO LAMBRIE

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.




Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13 Desember 2019

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,



IRIANTO LAMBRIE

No	NAMA	JABATAN	PARAF
1	Dr.H.Suriansyah, M.AP	Sekretaris Daerah	
2	Drs.H.Zainuddin HZ, M.Si	Asisten Administrasi Umum	
3	Arman Jauhari, S.H	Plt.Kepala Biro Hukum	
4	Drs.H.Abdul Matjid, S.M.Si	kepala Biro Organisasi	

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13 Desember 2019

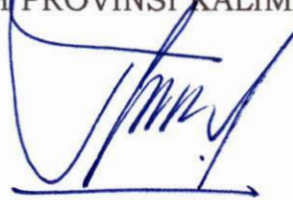
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE



Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,



SURIANSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2019 NOMOR 73

No	NAMA	JABATAN	PARAF
1	Drs.H.Zainuddin HZ, M.Si	Asisten Administrasi Umum	
2	Arman Jauhari, S.H	Plt. Kepala Biro Hukum	
3	Drs.H.Abdul Madjid S, M.Si	Kepala Biro Organisasi	

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13 Desember 2019

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,



SURIANSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2019 NOMOR 73

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
 NOMOR 73 TAHUN 2019
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR
 99 TAHUN 2017 TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN
 KERJA PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN
 LITBANG

HASIL ANALISA JABATAN DAN ANALISA BEBAN KERJA PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LITBANG

NO.	NAMA JABATAN	KEBUTUHAN PEGAWAI					KETERANGAN
		JABATAN PIMPINAN TINGGI	JABATAN ADMINISTRATOR	JABATAN PENGAWAS	JABATAN PELAKSANA	JABATAN FUNGSIONAL	
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Kepala Badan	1					
	1. Sekretaris		1				
	a. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian			1			
	1) Analis Barang Milik Negara				1		
	2) Analis Kerja Sama Teknis Standardisasi				1		
	3) Pengadministrasi Umum				2		
	4) Pengelola Kepegawaian				1		
	5) Pengemudi				1		
	b. Kepala Sub Keuangan			1			
	1) Analis Pengelola Keuangan				1		
	2) Penata Laporan Keuangan				1		
	3) Bendahara				1		
	4) Pengadministrasi Keuangan				2		
	5) Verifikator Keuangan				1		
	c. Kepala Sub Perencanaan						
	1) Analis Perencanaan				1		

	2) Pengadministrasi Perencanaan dan Program				1		
	2. Kepala Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah		1				
	a. Kasubbid Pembangunan Infrastruktur Konektivitas			1			
	1) Analis Pengembangan Infrastruktur				2		
	2) Analis Pengembangan Wilayah				1		
	3) Analis Jalan Jembatan				1		
	b. Kepala Sub Bidang Pembangunan Keciptakarya dan Sumber Daya Air			1			
	1) Analis pengelolaan Sumber Daya Air				1		
	2) Analis Perencanaan Wilayah Perumahan				1		
	c. Kepala Sub Bidang Pengembangan Wilayah			1			
	1) Analis Peta Wilayah				2		
	2) Analis Pengembangan Wilayah				1		
	3) Pengelola Geospasial				1		
	3. Kepala Bidang Pengkajian Perencanaan Daerah dan Pengendalian Pembangunan		1				
	a. Kasubbid Pengkajian Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan			1			
	1) Analis Data dan Informasi				1		
	2) Penyusun Rencana Kegiatan Dan Anggaran				1		
	b. Kepala Sub Bidang Monitoring, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan			1			
	1) Analis Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan				1		
	2) Analis Data Dan Informasi				1		

	3) Pengelola Monitoring Dan Evaluasi				1		
	c. Kepala Sub Bidang Data Dan Transparansi Perencanaan						
	1) Analis Data Dan Informasi				1		
	2) Pengolah Data Sistem Informasi Pelaksanaan Anggaran				1		
	4). Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam		1				
	a. Kasubbid Pengembangan Sumber Daya Alam			1			
	1) Penelaah Data Sumber Daya Alam				1		
	2) Pengelola Pelestarian Sumber Daya Alam				1		
	b. Kepala Sub Bidang Pengembangan Pariwisata Dan Lingkungan Hidup			1			
	1) Analis Pengembangan Potensi Daerah				1		
	2) Analis Kerjasama Bilateral dan Regional				1		
	3) Pengelola Perekonomian Pembangunan Dan Lingkungan Hidup				1		
	c. Kepala Sub Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif Dan Kemaritiman						
	1) Analis Pengembangan Wilayah				1		
	2) Analis Potensi Kelautan				1		
	3) Pengelola Pembinaan Dan Pengembangan Perekonomian				1		
	5). Kepala Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan		1				
	a. Kepala Sub Bidang Pengembangan Budaya Dan Sumber Daya Manusia			1			

	1) Analis Informasi Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur				1		
	2) Pengelola Pendidikan, Kebudayaan Dan Kesehatan				1		
	b. Kepala Sub Bidang Pemerintahan Dan Aparatur			1			
	1) Analis Pemerintahan Daerah				1		
	2) Pengadministrasi Pemerintahan				1		
	c. Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat						
	1) Analis Sistem Informasi				1		
	2) Penyusun Program Pengawasan Kesejahteraan Rakyat				1		
	6). Kepala Bidang Penelitian Dan Pengembangan		1				
	a. Kepala Sub Bidang Dokumentasi Dan Publikasi			1			
	1) Analis Penelitian Dan Pengembangan				1		
	2) Penyusun Bahan Informasi Dan Publikasi				1		
	3) Pengadministrasi Data Penyajian Dan Publikasi				1		
	b. Kepala Sub Bidang Penelitian Sumber Daya			1			
	1. Analis Penelitian Dan Pengembangan				1		
	2. Pengelola Penelitian				1		
	c. Kepala Sub Bidang Pengembangan Teknologi			1			
	1. Analis Penelitian Dan Pengembangan				1		
	2. Analis Pemanfaatan Teknologi				1		
	3. Pengelola Teknologi Informasi				1		

	7). Jabatan Fungsional Tertentu						
	a. Pranata Komputer Pertama					1	
	b. Pranata Komputer Muda					1	
	c. Perencana Pertama					1	
	d. Perencana Muda					1	
	e. Peneliti Ahli Pertama					1	
	f. Peneliti Ahli Muda					1	
	JUMLAH	1	6	18	53	6	
	JUMLAH TOTAL			84 Orang			

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13 Desember 2019

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,



IRIANTO LAMBRIE




	7). Jabatan Fungsional Tertentu						
	a. Pranata Komputer Pertama					1	
	b. Pranata Komputer Muda					1	
	c. Perencana Pertama					1	
	d. Perencana Muda					1	
	e. Peneliti Ahli Pertama					1	
	f. Peneliti Ahli Muda					1	
	JUMLAH	1	6	18	53	6	
	JUMLAH TOTAL			84 Orang			

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13 Desember 2019

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,



IRIANTO LAMBRIE

No.	NAMA	JABATAN	PARA
1	Dr.H. Suriansyah, M.AP	Sekretaris Daerah	
2	Drs.H. Zainuddin HZ, M.Si	Asisten Administrasi Umum	
3	Arman Jauhari, S.H	Plt. Kepala Biro Hukum	
4	Drs.H. Abdul Maetjel S. M.Si	Kepala Biro Organisasi	

	7). Jabatan Fungsional Tertentu						
	a. Pranata Komputer Pertama					1	
	b. Pranata Komputer Muda					1	
	c. Perencana Pertama					1	
	d. Perencana Muda					1	
	e. Peneliti Ahli Pertama					1	
	f. Peneliti Ahli Muda					1	
	JUMLAH	1	6	18	53	6	
	JUMLAH TOTAL			84 Orang			

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13 Desember 2019

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,



SURIANSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2019 NOMOR 73

No	NAMA	JABATAN	PARAF
1	Drs. H. Zamuddin HZ, M.Si	Asisten Administrasi Umum	
2	Arman Jauhari, S.H	Plt. Kepala Biro Hukum	
3	Drs. H. Abadi Madjid S, M.Si	Kepala Biro Organisasi	

	7). Jabatan Fungsional Tertentu						
	a. Pranata Komputer Pertama					1	
	b. Pranata Komputer Muda					1	
	c. Perencana Pertama					1	
	d. Perencana Muda					1	
	e. Peneliti Ahli Pertama					1	
	f. Peneliti Ahli Muda					1	
	JUMLAH	1	6	18	53	6	
	JUMLAH TOTAL				84 Orang		

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13 Desember 2019

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,



SURIANSYAH

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 73 TAHUN 2019

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 99 TAHUN 2017 TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS
BEBAN KERJA PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
DAN LITBANG

PETA JABATAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LITBANG

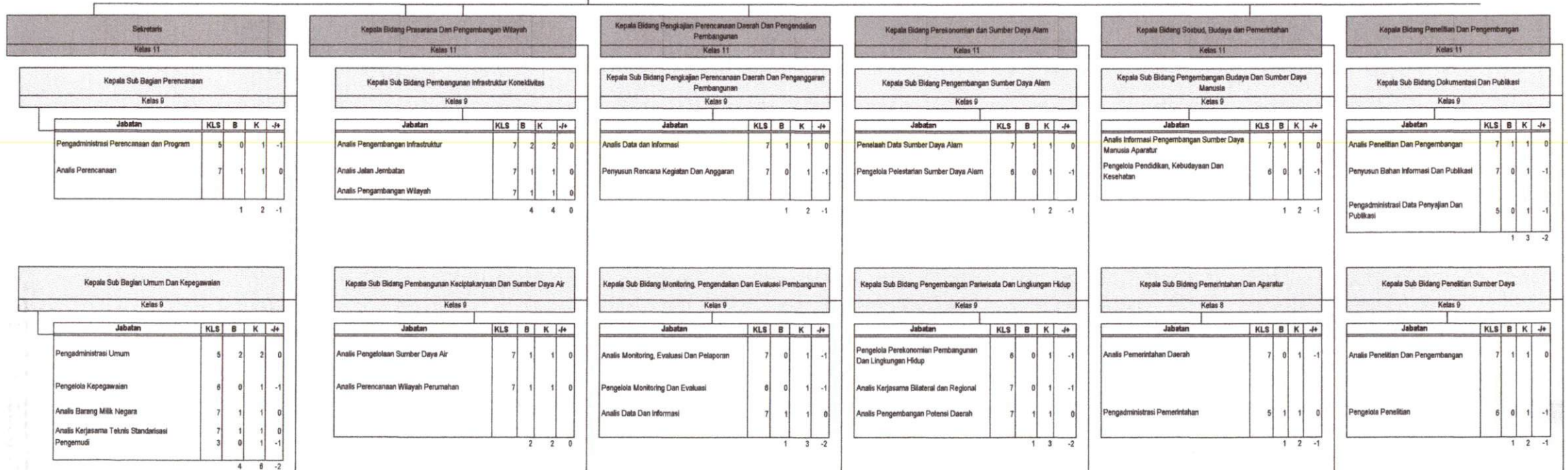
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan
Kelas 15

Rekapitulasi	Jumlah		
	B	K	-/+
Eselon II	1	1	0
Eselon III	5	6	-1
Eselon IV	18	18	0
JFT	1	6	-5
JFU	31	53	-22
Kurang	56	64	-28

Jabatan	KLS	B	K	-/+
Pranata Komputer Pertama	8	1	1	0
Pranata Komputer Muda	9	0	1	-1
Perencana Pertama	8	0	1	-1
Perencana Muda	8	0	1	-1
Peneliti Pertama	8	0	1	-1
Peneliti Muda	9	0	1	-1
		1	6	-5

Beban Kerja:

- ...
- ...



Kepala Sub Bagian Keuangan
Kelas 9

Jabatan	KLS	B	K	-J*
Bendahara	7	0	1	-1
Pengadministrasi Keuangan	5	2	2	0
Analisis Pengelolaan Keuangan	7	1	1	0
Penata Laporan Keuangan	7	1	1	0
Verifikator Keuangan	6	0	1	-1
	4	0	-2	

Kepala Sub Bidang Pengembangan Wilayah
Kelas 9

Jabatan	KLS	B	K	-J*
Analisis Peta Wilayah	7	2	2	0
Analisis Pengembangan Wilayah	7	1	1	0
Pengelola Geospasial	6	1	1	0
	4	4	0	

Kepala Sub Bidang Data Dan Transparansi Perencanaan
Kelas 8

Jabatan	KLS	B	K	-J*
Analisis Data Dan Informasi	7	0	1	-1
Pengolah Data Sistem Informasi Pelaksanaan Anggaran	6	1	1	0
	1	2	-1	

Kepala Sub Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif Dan Kemaritiman
Kelas 9

Jabatan	KLS	B	K	-J*
Analisis Pengembangan Wilayah	7	1	1	0
Analisis Potensi Kelautan	7	0	1	-1
Pengelola Pembinaan Dan Pengembangan Perikanan	6	0	1	-1
	1	3	-2	

Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat
Kelas 9

Jabatan	KLS	B	K	-J*
Analisis Sistem Informasi	7	1	1	0
Penyusun Program Pengawasan Kesejahteraan Rakyat	7	0	1	-1
	1	2	-1	

Kepala Sub Bidang Pengembangan Teknologi
Kelas 9

Jabatan	KLS	B	K	-J*
Analisis Penelitian Dan Pengembangan	7	1	1	0
Analisis Pemanfaatan Teknologi	7	0	1	-1
Pengelola Teknologi Informasi	6	0	1	-1
	1	3	-2	

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13 Desember 2019

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,



IRIANTO LAMBRIE

Kepala Sub Bagian Keuangan				
Kelas 9				
Jabatan	KLS	B	K	-J*
Bendahara	7	0	1	-1
Pengadministrasi Keuangan	5	2	2	0
Analisis Pengelolaan Keuangan	7	1	1	0
Penata Laporan Keuangan	7	1	1	0
Verifikator Keuangan	6	0	1	-1
	4	6	-2	

Kepala Sub Bidang Pengembangan Wilayah				
Kelas 9				
Jabatan	KLS	B	K	-J*
Analisis Peta Wilayah	7	2	2	0
Analisis Pengembangan Wilayah	7	1	1	0
Pengelola Geospasial	6	1	1	0
	4	4	0	

Kepala Sub Bidang Data Dan Transparansi Perencanaan				
Kelas 8				
Jabatan	KLS	B	K	-J*
Analisis Data Dan Informasi	7	0	1	-1
Pengolah Data Sistem Informasi Pelaksanaan Anggaran	6	1	1	0
	1	2	-1	

Kepala Sub Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif Dan Kemandirian				
Kelas 9				
Jabatan	KLS	B	K	-J*
Analisis Pengembangan Wilayah	7	1	1	0
Analisis Potensi Kelautan	7	0	1	-1
Pengelola Pembinaan Dan Pengembangan Perakonomian	6	0	1	-1
	1	3	-2	




Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat				
Kelas 9				
Jabatan	KLS	B	K	-J*
Analisis Sistem Informasi	7	1	1	0
Penyusun Program Pengawasan Kesejahteraan Rakyat	7	0	1	-1
	1	2	-1	

Kepala Sub Bidang Pengembangan Teknologi				
Kelas 9				
Jabatan	KLS	B	K	-J*
Analisis Penelitian Dan Pengembangan	7	1	1	0
Analisis Pemanfaatan Teknologi	7	0	1	-1
Pengelola Teknologi Informasi	6	0	1	-1
	1	3	-2	

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13 Desember 2019

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,


IRIANTO LAMBRIE

No	NIK	PEKERJAAN	STATUS
1	DR. H. SURIANSYAH, M.AP	SEKRETARIS DAERAH	
2	DR. H. ZAHUDDIN HZ, M.Si	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
3	ARMAN JUHARI, STI	PLT. KARD HUKUM	
4	DR. H. ABDEL MAJID S, M.Si	KARD ORGANISASI	

Kepala Sub Bagian Keuangan				
Kelas 9				
Jabatan	KLS	B	K	-/+
Bendahara	7	0	1	-1
Pengadministrasi Keuangan	5	2	2	0
Analisis Pengelolaan Keuangan	7	1	1	0
Penata Laporan Keuangan	7	1	1	0
Verifikator Keuangan	6	0	1	-1
	4	6		-2

Kepala Sub Bidang Pengembangan Wilayah				
Kelas 9				
Jabatan	KLS	B	K	-/+
Analisis Peta Wilayah	7	2	2	0
Analisis Pengembangan Wilayah	7	1	1	0
Pengelola Geospasial	6	1	1	0
	4	4		0

Kepala Sub Bidang Data Dan Transparansi Perencanaan				
Kelas 8				
Jabatan	KLS	B	K	-/+
Analisis Data Dan Informasi	7	0	1	-1
Pengolah Data Sistem Informasi Pelaksanaan Anggaran	6	1	1	0
		1	2	-1

Kepala Sub Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif Dan Kemitraan				
Kelas 9				
Jabatan	KLS	B	K	-/+
Analisis Pengembangan Wilayah	7	1	1	0
Analisis Potensi Kelautan	7	0	1	-1
Pengelola Pembinaan Dan Pengembangan Perekonomian	6	0	1	-1
		1	3	-2

Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat				
Kelas 9				
Jabatan	KLS	B	K	-/+
Analisis Sistem Informasi	7	1	1	0
Penyusun Program Pengawasan Kesejahteraan Rakyat	7	0	1	-1
		1	2	-1

Kepala Sub Bidang Pengembangan Teknologi				
Kelas 9				
Jabatan	KLS	B	K	-/+
Analisis Penelitian Dan Pengembangan	7	1	1	0
Analisis Pemanfaatan Teknologi	7	0	1	-1
Pengelola Teknologi Informasi	6	0	1	-1
		1	3	-2

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13 Desember 2019

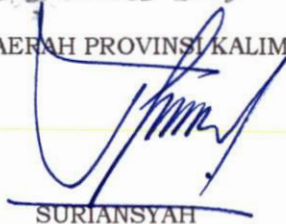
GOVERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,



SURIANSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2019 NOMOR 73

No	Nama	Jabatan
1	Drs. H. ZAINUDDIN H2, M.Si	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
2	ARMAN JAUHARI, CH	PLt. KARO HUKUM
3	Drs. H. ABDUL MAJID S, M. Si	KARO ORGANISASI

Kepala Sub Bagian Keuangan				
Kelas 9				
Jabatan	KLS	B	K	-/+
Bendahara	7	0	1	-1
Pengadministrasi Keuangan	5	2	2	0
Analisis Pengelolaan Keuangan	7	1	1	0
Penata Laporan Keuangan	7	1	1	0
Verifikator Keuangan	6	0	1	-1
	4	6	-2	

Kepala Sub Bidang Pengembangan Wilayah				
Kelas 8				
Jabatan	KLS	B	K	-/+
Analisis Peta Wilayah	7	2	2	0
Analisis Pengembangan Wilayah	7	1	1	0
Pengelola Geospasial	6	1	1	0
	4	4	0	

Kepala Sub Bidang Data Dan Transparansi Perencanaan				
Kelas 8				
Jabatan	KLS	B	K	-/+
Analisis Data Dan Informasi	7	0	1	-1
Pengolah Data Sistem Informasi Pelaksanaan Anggaran	6	1	1	0
	1	2	-1	

Kepala Sub Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif Dan Kemandirian				
Kelas 9				
Jabatan	KLS	B	K	-/+
Analisis Pengembangan Wilayah	7	1	1	0
Analisis Potensi Kelautan	7	0	1	-1
Pengelola Pembinaan Dan Pengembangan Perekonomian	6	0	1	-1
	1	3	-2	

Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat				
Kelas 9				
Jabatan	KLS	B	K	-/+
Analisis Sistem Informasi	7	1	1	0
Penyusun Program Pengawasan Kesejahteraan Rakyat	7	0	1	-1
	1	2	-1	

Kepala Sub Bidang Pengembangan Teknologi				
Kelas 9				
Jabatan	KLS	B	K	-/+
Analisis Penelitian Dan Pengembangan	7	1	1	0
Analisis Pemanfaatan Teknologi	7	0	1	-1
Pengelola Teknologi Informasi	6	0	1	-1
	1	3	-2	

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13 Desember 2019


GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,



SURIANSYAH